

PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENDORONG TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

(Studi Penelitian Kabupaten / Kota di Jawa Tengah)

Oleh : Nunik Retno Herawati

Abstract: The implementation of e-government aims to establish a good relationship between the government and the society as well as businesses that take place in an efficient, effective and economical. In addition, the purpose of implementing e-government is to achieve a good governance (good governance). Good governance has several elements one of which is the effectiveness and efficiency.

Departing from the above conditions, this study tried to describe the general adoption of e-Government Regency/City in Central Java. In detail, this study will discuss how the implementation of E Government Regency/City in Central Java and what the barriers to implementation of the E Government.

Application of E Government by Regency City in Central Java, most of the entry on stage 2 (two), but there are some districts / municipalities that have entered at step 3 (three) which apply online application for public services. For institutions, the need for clarity of authority and responsibility of all agencies in the government district / municipality. Some of Regency/City there that give's responsibility in the development of E Government Electronic Data Processing Section (PDE) in the Regional Secretariat. However there are some Regency/city that provide responsibility under the Department of Transportation, Communication and other Information. Another problem encountered is the lack of ability of the ranks of civil servants and others in the field of ICT for the conduct of government in the Regional (E-Government) and lack of budget implementation of e-government.

Keywords: E Government, Good Governance

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya, karena segala kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, murah, dan tepat, sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia bisnis (penggunaan e-commerce), pemerintahan (e-government), pendidikan (e-education, e-learning), kesehatan (e-medicine, e-laboratory), perbankan (e-banking) dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika (Winfried Lamersdorf (ed): 2010).

Seperti telah disinggung diatas, salah satu

penerapan penggunaan teknologi dalam pemerintahan yaitu e-government. World Bank memberikan definisi untuk istilah e-government yaitu penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Sedangkan pengertian yang lain mendefenisikan e-government yang dibagi lagi yaitu online sevices adalah bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya ke luar baik itu masyarakat maupun kepada pelaku bisnis contohnya seperti pembayaran retribusi, pajak properti atau lisensi. Selain itu e-Government bisa dimaknai sebagai government operations adalah kegiatan yang dilakukan dalam internal pemerintah, lebih khusus lagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah seperti electronic procurement, manajemen dokumen berbasis web, formulir elektronik dan hal-hal lain yang dapat disederhanakan dengan penggunaan internet. Aspek penting bahwa cakupan E-Government sebagai peran transformatif pemerintah menuju proses dan institusi yang

terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi melalui mana pembangunan berkelanjutan dapat berlangsung (Maria A.Wimmer Hans J. Scholl and Enrico Ferro (Ed).

Penerapan *e-government* bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis yang berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis (Marijn Janssen Hans J. Scholl and Maria A.Wimmer Yao-Hua Tan (Eds). Hal ini diperlukan mengingat masyarakat terus mengalami perubahan (dinamis), sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri, dan *e-government* adalah salah satu caranya. Selain itu tujuan penerapan *e-government* adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* memiliki beberapa unsur salah satunya adalah efektivitas dan efisiensi. Dengan penerapan *e-government* maka akan membantu tercapainya efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan dalam mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government (*e-Gov*) diamanatkan bahwa setiap Gubernur dan Bupati / Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *E-Government* secara nasional.

Saat ini banyak dari Pemerintah Daerah menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan *E-Government* padahal kenyataannya Pemerintah Daerah tersebut baru melaksanakan pada tahap *Web presence*, masih belum terlihat adanya penerapan *e-Government* yang benar-benar dijalankan secara mendalam. Oleh karena itu banyak kalangan yang menyatakan penerapan *e-government* belum dilaksanakan secara optimal karena secara riil beberapa pelayanan yang dilakukan pemerintah Daerah masih menggunakan cara-cara yang manual.

Dalam implementasinya ada beragam tipe pelayanan yang bisa dilaksanakan oleh Pemerintah kepada masyarakatnya melalui *E-Government*,

diantaranya:

1. SIMTAP (Sistem Informasi Satu Atap Terpadu)
2. SIMBADA (Sistem Informasi Barang dan Aset Daerah)
3. SIAK/SIMDUK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
4. SIMKEUDA/SAKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah)
5. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)
6. SIMPATDA (Sistem Informasi Pendapatan Daerah)
7. SIMKES (Sistem Informasi Manajemen Kesehatan)
8. SIMPUS (Sistem Informasi Puskesmas)
9. SIM TENDER/E-PROCUREMENT (Sistem Informasi Lelang/Tender)
10. SIM RUMAH SAKIT (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)
11. SIADIK (Sistem Informasi Sidik Jari)
12. SIM ARSIP/E-OFFICE (Sistem Informasi Kearsipan)
13. GIS (Geographical Information System)

Berangkat dari kondisi di atas, penelitian ini berusaha memotret secara umum penerapan *e-Government* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Secara detail Penelitian ini nantinya akan membahas bagaimana penerapan *E Government* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta apa yang menjadi hambatan dalam penerapan *E Government* tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk : mendeskripsikan dan menganalisis penerapan *e-Government* Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah secara umum. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis hambatan dalam penerapan *e-Government* Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Definisi mengenai *e-government* banyak dikemukakan oleh para ahli ataupun oleh suatu institusi. Ari-Veikko Anttiroiko (2008), "...*e-government as the government's use of technology, in particular, web-based Internet applications to enhance access and delivery of government services to citizens, business partners, employees and other government entities*". Pengertian diatas memberikan penjelasan bahwa *e-government* merupakan penggunaan teknologi oleh pemerintah khususnya penggunaan aplikasi internet berbasis *web* untuk meningkatkan akses dan pemberian layanan pemerintah kepada

warga negara, mitra bisnis, pegawai atau karyawan, dan badan pemerintah lainnya.

Menurut World Bank (2004) memberikan definisi terhadap *e-government* sebagai berikut: *E-government refers to the use by government agencies of information technologies that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to citizens, improved interactions with business and industry, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or cost reductions.* Artinya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan unit lain dari pemerintah. Teknologi yang digunakan ini dapat melayani sebuah keragaman yang berbeda yaitu pemberian pelayanan pada warga negara yang lebih baik, meningkatkan interaksi dengan dunia bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses terhadap informasi, atau manajemen pemerintah yang lebih efisien. Hasil yang didapat yaitu korupsi yang berkurang, transparansi yang meningkat, kenyamanan yang lebih besar, peningkatan penerimaan negara, dan/atau pengurangan biaya.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik satu benang merah yaitu bahwa *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. *E-government* memiliki banyak manfaat guna menunjang efektivitas dan efisiensi pelayanan publik (Darrell M. West:2005). Ada tiga dimensi dalam melihat manfaat dari penerapan *e-government*, yaitu dimensi, ekonomi, sosial, dan pemerintahan.

1. Dimensi ekonomi. Dalam hal ekonomi, manfaat *e-government* di antaranya yaitu mengurangi biaya transaksi untuk kapasitas yang lebih baik dengan target pelayanan, peningkatan cakupan dan kualitas penyampaian pelayanan, meningkatkan kapasitas respon dalam mengatasi permasalahan isu-isu kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.
2. Dimensi sosial. Dalam hal sosial, manfaat *e-government* cukup beragam mulai dari penciptaan lapangan kerja di sektor ketiga,

peningkatan sistem pendidikan dan kesehatan, penargetan yang lebih baik atas pelayanan pemerintah, peningkatan kapasitas dalam penyediaan keselamatan dan keamanan. Pada banyak kasus manfaat-manfaat ini dapat dievaluasi dalam istilah-istilah politik dan dapat dikuantifikasi dalam istilah keuangan.

3. Dimensi pemerintahan. Dalam hal pemerintahan, manfaat *e-government* dapat meningkatkan tercapainya *good governance* dalam hal peningkatan keterbukaan, transparansi, akuntabel atau demokratis dibandingkan pemerintahan yang konvensional. *E-government* juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat mengokohkan sistem demokrasi yang ada.

Banyak yang percaya, pengelolaan lembaga atau perusahaan secara elektronik - baik untuk swasta maupun pemerintah-selain meningkatkan transparansi, juga bisa meningkatkan efisiensi (menurunkan biaya dan meningkatkan efektivitas/meningkatkan daya hasil) (Winfried Lamersdorf (ed): 2010).

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*clean and good governance*) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Konsep "*governance*" dalam "*clean and good governance*" banyak masyarakat merancukan dengan konsep "*government*". Konsep "*governance*" lebih inklusif daripada "*government*". Konsep "*government*" menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep "*governance*" melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas (Ganie-Rochman, 2000:141).

Berdasar atas hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*), UNDP dalam dokumen kebijakannya mengajukan karakteristik atau prinsip-prinsip utama *good governance* (Bintoro, 2003), yaitu sebagai berikut:

1. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili

kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of Law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
5. *Consensus Orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equity*. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. *Strategic Vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 1998:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian Kualitatif ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan atau menggambarkan situasi atau peristiwa yang terjadi pada obyek penelitian.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dilakukan dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung sementara Data sekunder yang digunakan dalam analisis ini adalah data dari berbagai media surat kabar.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government), pengembangan *e-government* dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut:

Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi:

1. Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;
2. Penyiapan Sumber Daya Manusia;
3. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana *Multipurpose Community Center*, Warnet, *SME-Center*, dll;
4. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.

Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi:

1. Pembuatan situs informasi publik interaktif;
2. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;

Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi:

1. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
2. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi:

Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

Dari gambaran di atas semua pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah membangun situs Web sebagai salah satu bentuk layanan masyarakat. Tabel di bawah menunjukkan bukti keberadaan situs Web Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang dapat diakses masyarakat.

Tabel 1
Alamat website Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

| NO | KABUPATEN / KOTA | WEBSITE | ALAMAT EMAIL |
|----|-------------------|--|--|
| 1 | Kab. Cilacap | www.cilacapkab.go.id | pemkab@cilacapkab.go.id |
| 2 | Kab. Banyumas | www.banyumaskab.go.id | admin@banyumaskab.go.id |
| 3 | Kab. Purbalingga | www.purbalinggakab.go.id | - |
| 4 | Kab. Banjarnegara | www.banjarnegarakab.go.id | - |
| 5 | Kab. Kebumen | www.kebumenkab.go.id | Pemkab kebumen@kebumenkab.go.id |
| 6 | Kab. Purworejo | www.purworejokab.go.id | - |
| 7 | Kab. Wonosobo | www.wonosobokab.go.id | - |
| 8 | Kab. Magelang | www.magelangkab.go.id | kominfo@magelangkab.go.id |
| 9 | Kab. Boyolali | www.boyolalikab.go.id | - |
| 10 | Kab. Klaten | www.klatenkab.go.id | - |
| 11 | Kab. Sukoharjo | www.sukoharjokab.go.id | kpde@sukoharjokab.go.id |
| 12 | Kab. Wonogiri | www.wonogirikab.go.id | - |
| 13 | Kab. Karanganyar | www.karanganyar.go.id | pde@karanganyarkab.go.id |
| 14 | Kab. Sragen | www.sragenkab.go.id | - |
| 15 | Kab. Grobogan | www.grobogankab.go.id | mail@grobogan.go.id |
| 16 | Kab. Blora | www.blorakab.go.id | - |
| 17 | Kab. Rembang | www.rembangkab.go.id | dinhubkominfo@rembangkab.go.id |
| 18 | Kab. Pati | www.patikab.go.id | - |
| 19 | Kab. Kudus | www.kuduskab.go.id | dinhubkominfo@kuduskab.go.id |
| 20 | Kab. Jepara | www.jeparakab.go.id | dishubkominfo@jeparakab.go.id |
| 21 | Kab. Demak | - | - |
| 22 | Kab. Semarang | - | - |
| 23 | Kab. Temanggung | www.temanggungkab.go.id | info@temanggungkab.go.id |
| 24 | Kab. Kendal | www.kendalkab.go.id | - |
| 25 | Kab. Batang | www.batangkab.go.id | dinhubkominfo@mail.batangkab.go.id |
| 26 | Kab. Pekalongan | www.pekalongankab.go.id | info@pekalongankab.go.id |
| 27 | Kab. Pemalang | www.pemalangkab.go.id | kontak@pemalangkab.go.id |
| 28 | Kab. Tegal | www.tegalkab.go.id | - |
| 29 | Kab. Brebes | www.brebeskab.go.id | dinhubkominfo@brebeskab.go.id |
| 30 | Kota Magelang | www.magelangkota.go.id | - |
| 31 | Kota Surakarta | www.surakarta.go.id | dishubkominfo@surakarta.go.id |
| 32 | Kota Salatiga | www.salatigakota.go.id | humas@salatigakota.go.id |
| 33 | Kota Semarang | www.semarangkota.go.id | bagpde@semarangkota.go.id |
| 34 | Kota Pekalongan | www.pekalongankota.go.id | sekda@pekalongankota.go.id |
| 35 | Kota Tegal | www.tegalkota.go.id | info@tegalkota.go.id |

Namun demikian masih ada beberapa hambatan dalam pengelolaan web site di atas, diantaranya ada beberapa situs Web Pemerintah Kabupaten / Kota yang dalam beberapa waktu tidak bisa diakses, diantaranya situs Web Pemerintah Kabupaten Semarang dan Situs Web Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Selain itu akses untuk membuka web di beberapa Kabupaten masih membutuhkan waktu cukup lama. Hal ini mungkin terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing daerah.

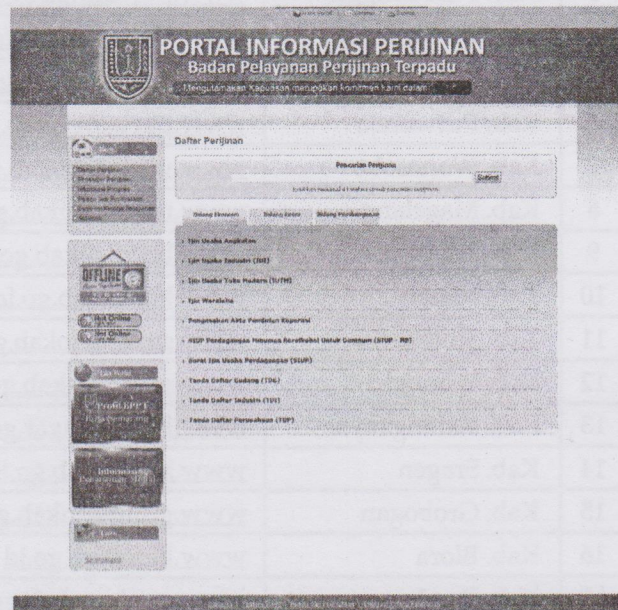
Berdasarkan hasil analisis penulis masih ada beberapa informasi yang tidak dimunculkan dalam tampilan situs Web Pemerintah Kabupaten / Kota, diantaranya :

1. Fasilitas akses multi bahasa. Fasilitas multi bahasa ini sangat penting dan bermanfaat bagi pengakses yang menggunakan bahasa inggris.
2. Layanan informasi berita yang update. Dari analisis menunjukkan bahwa masih ada beberapa situs Web Kabupaten / Kota yang tidak update dalam informasi maupun berita.
3. Pelayanan Publik misalnya perijinan. Beberapa Kabupaten tidak memberikan informasi yang lengkap tentang masalah perijinan
4. Transparansi pengelolaan Keuangan Daerah. Hanya beberapa situs Web Kabupaten / Kota yang memiliki tampilan mengenai pengelolaan keuangan daerah (APBD).
5. Informai mengenai jumlah pengunjung Web. Informasi ini sangat penting untuk mengetahui umpan balik dari masyarakat.

Jika dianalisis dari tampilan situs Web Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tampak bahwa mayoritas Kabupaten/Kota masih masuk pada fase kedua, yaitu tahap interaksi. Aplikasi fasilitas interaksi ditunjukkan dari adanya Buku Tamu, forum, chatting, dialog ataupun link kontak pada tampilan situs Web Pemerintah Daerah. Namun demikian sering terjadi fasilitas aplikasi interaksi tersebut kurang berfungsi dengan baik. Di Beberapa situs Web Pemerintah Kabupaten/Kota aplikasi interaksi tersebut masih kosong. Ada juga yang model komunikasinya satu arah dalam arti masyarakat bisa menyatakan keluhannya tetapi sering terjadi tidak ada respon balik dari aparat terkait.

Terkait perkembangan level pengembangan *E Government*, Pemerintah kota semarang dapat

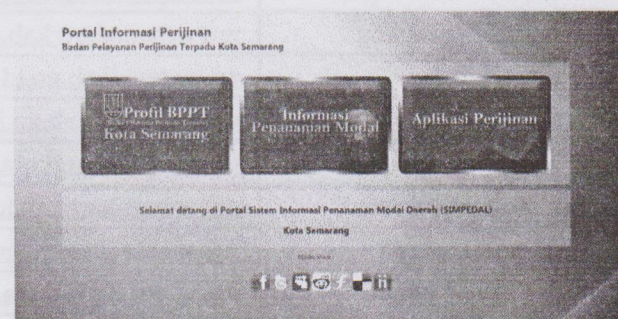
diklasifikasikan sudah memasuki level 3. Hal ini bisa dilihat dari isi (content) situs Web Pemerintah Kota Semarang yang sudah menampilkan adanya tahap transaksi. Di Bidang Layanan Publik, Pemerintah Kota Semarang lebih maju dibanding Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah dalam hal perijinan. Selain informasi yang diberikan lengkap, tampilan perijinan di Kota Semarang cukup bagus. Hal ini bisa dilihat dari tampilan berikut ini



Gambar 1 : Sistem Perijinan secara elektronik di Kota Semarang

Keunggulan lain dari penerapan *E Government* Pemerintah Kota Semarang adalah adanya sistem online dalam bidang :

1. SIMPEDAL : Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah



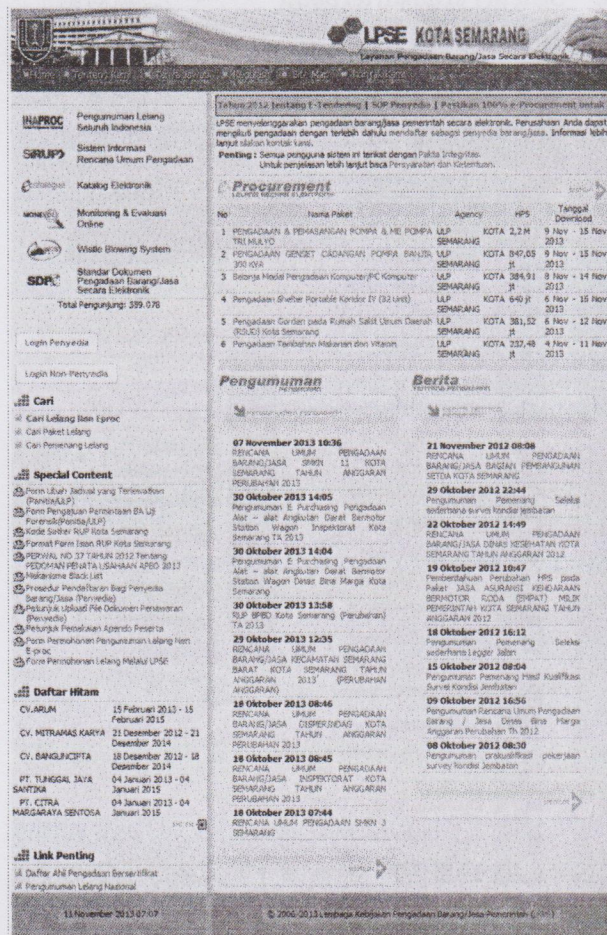
Gambar 2 : Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah Kota Semarang

2. SIMPENDIK : Sistem Informasi Manajemen Pendidikan



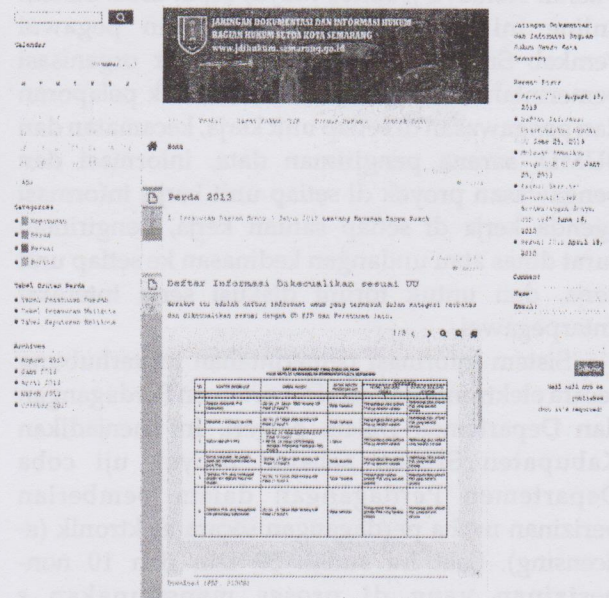
Gambar 3 : Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kota Semarang

3. LPSE : layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Online



Gambar 4 : layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Online Kota Semarang

4. JDIH : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum



Gambar 5 : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara Elektronik di Kota Semarang

Selain Pemerintah Kota Semarang, Penerapan *e government* di Kabupaten Sragen bisa menjadi contoh yang menarik dalam penerapan *e Government*. Pemerintah Kabupaten Sragen memang banyak menjadi rujukan pemda-pemda lain. Untung Wiyono (Mantan Bupati Sragen), mengatakan bahwa Kabupaten Sragen sudah menerapkan *E Government* secara penuh. Hasilnya, Pemerintah Kabupaten Sragen memiliki beberapa jenis layanan publik unggulan. Bukti konkrit penerapan *E Government* antaralain:

Pertama, Sistem Informasi Manajemen Kependudukan sejak 2003. Layanan ini memungkinkan pembuatan KTP hanya butuh waktu lima menit, tanpa ada pungutan liar dan prosedur yang berbelit.

Kedua, Sistem Informasi Manajemen Perizinan sejak 2005. Sistem ini bisa melacak (*tracking*) dokumen perizinan secara online. *E Government* memungkinkan Pemerintah Kabupaten Sragen memberikan layanan perizinan terpadu di kantor pelayanan satu atap kepada kalangan dunia usaha.

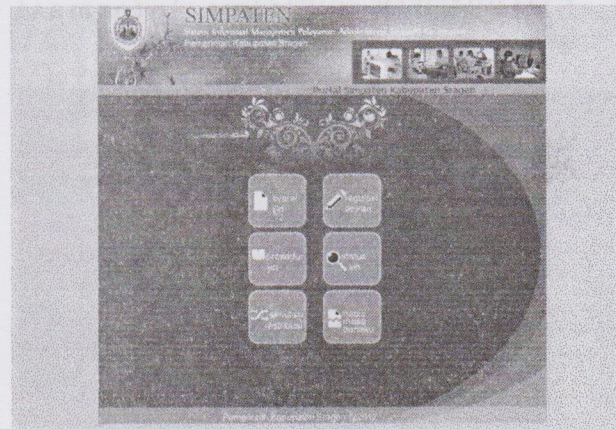
Ketiga, website resmi Pemkab Sragen sejak 2002. Lewat website, masyarakat bisa memperoleh informasi lengkap mengenai profil dan potensi kabupaten yang terdiri dari 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan ini, termasuk harga sembako dan sarana interaktif aparat dan masyarakat.

Keempat, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kantaya (Kantor Maya) sejak 2004. Sistem online ini mempermudah pekerjaan pegawai Pemkab Sragen dan koordinasi antar organisasi pemerintahan di sana. Misalnya, untuk pelaporan dan pengawasan di setiap unit kerja, kecamatan dan BUMD, sarana pengiriman data, informasi dan pengawasan proyek di setiap unit kerja, informasi agenda kerja di setiap satuan kerja, pengiriman surat dinas atau undangan kedinasan ke setiap unit kerja, dan untuk forum diskusi serta interaksi antarpegawai.

Sistem informasi pemerintahan ini terhubung secara elektronik dengan Departemen Perdagangan dan Departemen Dalam Negeri. Ini menjadikan Kabupaten Sragen sebagai proyek uji coba Departemen Perdagangan dalam pemberian perizinan usaha perdagangan secara elektronik (e-licensing). Saat ini sudah 59 izin dan 10 non-perizinan yang di proses menggunakan *e government*. Kabupaten Sragen juga sudah mempunyai 13 aplikasi sistem untuk kantor pemerintah dan rumah sakit serta sudah membangun jaringan sampai ke 208 desa.*

Penerapan *e Government* di pemerintah Kabupaten Sragen terdiri dari 2 bagian yaitu:

1. *Back Office Management Information System*
Pada bagian ini terdiri atas :
 - a. Aplikasi Kantor Maya (Kantaya)
 - b. Aplikasi Surat Maya (Surya)
 - c. Aplikasi Disposisi Maya
 - d. Sistem Informasi Pemerintahan Desa (Simpemdes)
 - e. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
 - f. CCTV
 - g. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
 - h. Sistem Informasi Manajemen Penggajian
 - i. Sistem Informasi Manajemen Asset
 - j. Sistem Manajemen Rumah Sakit
 - k. Sistem Informasi Puskesmas (Simpus)
 - l. Tele Medicine
 - m. E Education (E learning dan E Library)
 - n. Alat Pemungutan Suara Digital
2. *Front Office Management Information system*
Pada bagian ini terdiri dari :
 - a. Portal Web Sragen
 - b. Email/Kontak Publik
 - c. Sistem Informasi Geografis
 - d. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Simduk)



Gambar 6 : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Sragen

- e. Sistem Jaringan Data Informasi Hukum (SJDIH)
- f. Aplikasi Perdagangan antar Wilayah
- g. Layanan Pengadaan Secara Online
- h. Sistem Perijinan terpadu



Gambar 7 : Sistem Perijinan terpadu Kabupaten Sragen

* <http://tovikantandjaja.blogspot.com/2013/01/kajian-e-gov-kabupaten-sragen.html>

i. Penanggulangan Kemiskinan



Gambar 8 : UPT Penanggulangan Kemiskinan secara elektronik di Kabupaten Sragen

Penerapan *E Government* di Kabupaten Sragen sejak tahun 2002 sampai sekarang telah membawa banyak manfaat diantaranya:

1. Peningkatan Komunikasi data dan informasi
2. Peningkatan kecepatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat
3. Peningkatan kecepatan dan kelancaran reporting data informasi dan kegiatan
4. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian
5. Peningkatan budaya kerja, efektifitas waktu dan biaya serta perubahan dari manual menjadi computerized
6. Mengurangi pengeluaran biaya operasional (alat tulis, transportasi dan komunikasi)
7. Kesiapan menghadapi globalisasi
8. Mempererat persaudaraan dan persahabatan

Penerapan *E Government* di Pemerintah Kabupaten Sragen dibawah tanggungjawab Kantor Pengolahan Data Elektronik yang sebelumnya merupakan Bagian Litbang dan Data Elektronik Sekretariat Daerah. Dasar hukumnya adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, Bagian Litbang dan Data Elektronik, Sekretariat Daerah sebagai satuan

kerja yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan teknologi informasi.

2. Peraturan Bupati Nomor 1/ 2004, Bagian Litbang dan Data Elektronik diberi tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pengolahan data elektrotortik. Sedangkan fungsi yang dilaksanakan antara lain adalah evaluasi pengolahan data elektronik dalam rangka kegiatan manajemen sistem informasi, telematika dan pendayagunaan sistem informasi.
3. Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kantor PDE Kab.Sragen
4. Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2008 Tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kab. Sragen

Bagian Litbang dan Data Elektronik Sekretariat Daerah mengkoordinir tiga Sub Bagian (SubBag), yakni SubBag Litbang, SubBag Distek (Diseminasi Teknologi), dan SubBag PDE. Total SDM di bagian Litbang dan Pengelolaan Data Elektronik (PDE) berjumlah 21 orang. Dan jumlah itu, tercatat 7 orang yang mempunyai latar belakang informatika dan mengerti TI secara teknis. Meski terbatas, kru PDE bertanggung jawab bila terjadi kendala komputer atau jaringan di dinas kerja maupun kecamatan. Sebenarnya, bisa saja pembangunan TI diserahkan kepada pihak ketiga. Hanya saja, sudah menjadi kesepakatan antara jajaran PDE, Bupati dan DPRD, bahwa urusan TI akan ditangani sendiri. Terkecuali dalam hal pemasangan tower Pemerintah Kabupaten Sragen masih menggunakan jasa pihak ketiga, sementara semua pembangunan aplikasi dapat ditangani sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Yang menarik di Kabupaten Sragen adalah adanya 2 instansi yang ada kaitannya dengan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu : Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan tampak minimnya animo masyarakat untuk membuka akses Situs Web Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini ada beberapa alasan yang melatarbelaknginya:

1. Masih minimnya akses internet di masyarakat
2. Masih minimnya sosialisasi tentang

keberadaan Situs Web Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Informasi dalam Situs Web Pemerintah Kabupaten/Kota belum dilengkapi dengan informasi yang komprehensif. Bahkan

Selain permasalahan di atas, pengelolaan atau tata kelola teknologi Informasi juga ternyata berbeda - berbeda duntuk setiap Kabupaten / Kota. Beberapa Kabupaten / Kota ada yang memberikan tanggung jawan pengembangan *E Government* di

Tabel 2
Jumlah pengunjung Website Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

| NO | KABUPATEN/KOTA | Pengunjung | |
|----|-------------------|------------|-----------|
| | | Webmail | Dilihat |
| 1 | Kab. Cilacap | 332.834 | 658.515 |
| 2 | Kab. Banyumas | - | 113.523 |
| 3 | Kab. Purbalingga | | 2.355.845 |
| 4 | Kab. Banjarnegara | - | - |
| 5 | Kab. Kebumen | | 2.145.993 |
| 6 | Kab. Purworejo | | 3.082.804 |
| 7 | Kab. Wonosobo | - | - |
| 8 | Kab. Magelang | | 1.573.321 |
| 9 | Kab. Boyolali | - | - |
| 10 | Kab. Klaten | | 6.247 |
| 11 | Kab. Sukoharjo | - | - |
| 12 | Kab. Wonogiri | 942.234 | 3.367.587 |
| 13 | Kab. Karanganyar | - | - |
| 14 | Kab. Sragen | - | - |
| 15 | Kab. Grobogan | | 333.616 |
| 16 | Kab. Blora | - | - |
| 17 | Kab. Rembang | - | - |
| 18 | Kab. Pati | - | - |
| 19 | Kab. Kudus | - | - |
| 20 | Kab. Jepara | - | 301.061 |
| 21 | Kab. Demak | - | - |
| 22 | Kab. Semarang | - | - |
| 23 | Kab. Temanggung | - | - |
| 24 | Kab. Kendal | - | 28.343 |
| 25 | Kab. Batang | 45.893 | 177.583 |
| 26 | Kab. Pekalongan | - | - |
| 27 | Kab. Pemasang | - | - |
| 28 | Kab. Tegal | - | - |
| 29 | Kab. Brebes | - | - |
| 30 | Kota Magelang | - | - |
| 31 | Kota Surakarta | - | - |
| 32 | Kota Salatiga | - | - |
| 33 | Kota Semarang | - | 9.846 |
| 34 | Kota Pekalongan | - | 3.714.643 |
| 35 | Kota Tegal | - | 9.134.518 |

beberapa akses sering muncul tapi ketika dibuka justru server not found. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa instansi yang masing bersifat pasang nama tetapi belum melaksanakan *E Government*

Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) di Sekretariat Daerah. Namun ada beberapa Kabupaten / Kota yang memberikan Tanggungjawab di bawah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.

Tabel 3
Penanggung Jawab / Pelaksana Pengembangan *E-Government*
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

| NO | KABUPATEN/KOTA | Pengelola | |
|-----|-------------------|---|-----------------|
| | | Instansi | Copyright |
| 1. | Kab. Cilacap | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Cilacap | 1 Januari 2008 |
| 2. | Kab. Banyumas | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banyumas | 2013 |
| 3. | Kab. Purbalingga | Pemkab Purbalingga | 2013 |
| 4. | Kab. Banjarnegara | Bagian Humas Setda Banjarnegara | Desember 2012 |
| 5. | Kab. Kebumen | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen | 2 Juli 2012 |
| 6. | Kab. Purworejo | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Purworejo | 2013 |
| 7. | Kab. Wonosobo | Pemkab wonosobo | - |
| 8. | Kab. Magelang | Dinas Komunikasi dan Informatika Bidang PDE Kab. Magelang | 26 agustus 2009 |
| 9. | Kab. Boyolali | - | - |
| 10. | Kab. Klaten | KPDE Kabupaten Klaten | 2013 |
| 11. | Kab. Sukoharjo | Bagian Pengolahan Data Elektronik Kab. Sukoharjo | 2012 |
| 12. | Kab. Wonogiri | KPDE Kabupaten Wonogiri | 2008 |
| 13. | Kab. Karanganyar | Bagian PDE Setda Kabupaten Karanganyar | 2011 |
| 14. | Kab. Sragen | PDE Kabupaten Sragen | 2007 |
| 15. | Kab. Grobogan | Bidang Informasi Publik Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kab. Grobogan | 2010 |
| 16. | Kab. Blora | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora | 2008 |
| 17. | Kab. Rembang | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang | 2012 |
| 18. | Kab. Pati | Pemkab Pati | 2013 |
| 19. | Kab. Kudus | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus | 2012 |
| 20. | Kab. Jepara | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Jepara | 2012 |
| 21. | Kab. Demak | - | - |
| 22. | Kab. Semarang | - | - |
| 23. | Kab. Temanggung | Bagian Humas Setda Kab. Temanggung | 2008 |
| 24. | Kab. Kendal | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal | 2013 |
| 25. | Kab. Batang | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Batang | 2012 |

| | | | |
|-----|-----------------|---|------|
| 26. | Kab. Pekalongan | Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pekalongan | 2010 |
| 27. | Kab. Pematang | Pemkab Pematang | 2013 |
| 28. | Kab. Tegal | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal | 2011 |
| 29. | Kab. Brebes | Bidang Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Brebes | - |
| 30. | Kota Magelang | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang | 2009 |
| 31. | Kota Surakarta | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta | - |
| 32. | Kota Salatiga | Bagian Humas Pemkot Salatiga | 2011 |
| 33. | Kota Semarang | Bagian PDE Pemkot Semarang | 2012 |
| 34. | Kota Pekalongan | Sekda Pemkot Pekalongan | 2011 |
| 35. | Kota Tegal | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal | 2012 |

Saat ini seluruh pemda di Indonesia sedang menata struktur organisasinya berdasarkan diri pada, antara lain, PP 41/2007. *Electronic Government* pada umumnya diartikan sebagai urusan kominfo, dan itu satu rumpun bersama urusan perhubungan serta berbentuk dinas. Maka di banyak daerah muncul Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Penempatan perhubungan dan kominfo dalam satu rumpun dirasa banyak kalangan sudah tidak tepat lagi. Teknologi komunikasi, karena masuk ke semua bidang, maka sebaiknya berdiri sendiri dalam suatu rumpun urusan; tidak dicampur dengan urusan lain.

Permasalahan lain juga muncul karena dalam PP 41/2007 menyatakan urusan kominfo harus berbentuk dinas karena melayani langsung masyarakat. Dengan kata lain, tidak berbentuk "badan" (yang lebih berfokus membuat kebijakan) dan bukan pula "biro" (yang berfungsi mendukung urusan internal pemda).

Memang selama ini dalam pengembangan *e-government* di Indonesia, tidak semua pemda memulai *e-government* sebagai pelayanan langsung ke masyarakat. Pada umumnya, pemda memulai *e-government*-nya dengan membangun kapasitas pengolahan data elektronik (dalam bentuk Kantor PDE atau suatu bidang PDE di bawah suatu biro). Pada tahap ini, *e-government* berfungsi sebagai "IT

support", dalam arti mendukung kegiatan internal pemda, dengan antara lain beberapa sistem informasi manajemen (SIM kepegawaian, keuangan, aset barang, dsb.). Pada tahap berikutnya, pemda mulai membuat layanan langsung ke masyarakat, dalam bentuk layanan loket-loket online, *website*, dan sebagainya. Pada tahap ini, bentuk kelembagaan biasanya berbentuk dinas. Dalam tahap ini, teknologi informasi difungsikan sebagai "*IT enabler*", memungkinkan pemda meningkatkan kualitas layanannya ke masyarakat. Secara umum, memang tahap inilah yang dituju kebanyakan pemda di Indonesia, maka tidak salah bila PP 41/2007 mensyaratkan urusan kominfo (yang didalamnya mencakup *e-government*) berbentuk dinas.

Sebenarnya pengembangan E Government juga bisa ditangani lembaga lintas instansi yang disebut sebagai "*IT driver*", yaitu teknologi informasi difungsikan sebagai pemacu atau akselerator pembangunan wilayah. Lembaga yang menangani fungsi ini merumuskan kebijakan lintas instansi dalam memanfaatkan TI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah (seperti sudah dipraktekkan di Provinsi DIY sejak tahun 2005 dalam bentuk program *Digital Government Services*, disingkat DGS). Di perusahaan pada umumnya, fungsi ini dipegang oleh seorang CIO (*chief information officer*), mungkin setingkat

wakil direktur atau posisi sejenis yang mengkoordinasikan lintas divisi. Di pemda, mestinya fungsi ini paling tidak dipegang oleh seorang kepala badan atau asisten sekda (bukan oleh seorang kepala dinas). Kepala badan bertugas merumuskan kebijakan disamping dapat melayani langsung ke masyarakat (melalui UPT badan). Tugas seperti itu telah dilakukan misalnya oleh Badan Informasi Daerah (BID) Provinsi DIY, yang dalam waktu empat tahun terakhir ini (sejak 2004) telah mengantarkan DIY menempati posisi unggulan dalam percaturan *e-government* secara nasional di Indonesia. BID Provinsi DIY sejak tahun 2005 juga mengkoordinasikan upaya pengembangan *Digital Government Services* (DGS) yang bersifat lintas fungsi (antara lain: pendidikan, pariwisata, perhubungan, pertanian, perikanan dan kelautan, perindagkop, kesehatan, nakertrans). Upaya ini telah banyak mendapat perhatian daerah-daerah lain dan juga mengantarkan Provinsi DIY meraih *e-government award* tiap tahun sejak tahun 2004.

Di masa depan, upaya untuk menyeragamkan kelembagaan *e-government* dalam bentuk dinas perlu ditinjau kembali. Biarkanlah tiap pemda membentuk kelembagaan sesuai dengan tingkat perkembangan *e-government* di daerahnya masing-masing. Daerah pemula dapat membuat suatu "Biro PDE"; pemda yang lebih maju melembagakannya dalam "Dinas Kominfo", dan pemda yang lebih maju setingkat lagi dapat membentuk "Badan Kominfo" serta pemda yang paling maju mewadahnya dalam posisi Asisten Sekda tertentu yang berfungsi sebagai CIO (*Chief Information Officer*) atau semacam itu. Posisi CIO seperti itu misalnya dapat dijumpai di beberapa negara bagian di Kanada atau Australia.

Dalam Pengembangan *E Government*, permasalahan lain yang ditemui adalah lemahnya kemampuan Pegawai lembaga Teknologi Informasi dan jajaran PNS lainnya dalam bidang ICT kemudian muncul mengiringi upaya pemanfaatan ICT untuk penyelenggaraan pemerintah di Daerah (*E-Government*). Harus diakui, bahwa keberadaan pegawai dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital. Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas pegawai yang bekerja di dalamnya. Perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut kemampuan mereka dalam menangkap fenomena perubahan tersebut, menganalisa dampaknya terhadap organisasi dan menyiapkan

langkah-langkah guna menghadapi kondisi tersebut. Dengan demikian, maka peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi tidak hanya sekedar administratif tetapi justru lebih mengarah pada bagaimana mampu mengembangkan potensi sumber daya manusia agar menjadi kreatif dan inovatif serta mampu memenuhi kebutuhan kerja organisasi.

PENUTUP

Penerapan *E Government* oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah hampir sebagian besar masuk pada tahap 2 (dua), namun ada beberapa Kabupaten/Kota yang sudah masuk pada tahap 3 (tiga) yaitu menerapkan aplikasi online untuk pelayanan publik. Pada tahap 2 (dua) sebenarnya Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai tahapan interaksi, melalui forum chat dan email, tetapi sudah mempunyai fungsi dan orientasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada publik, sedangkan proses pengolahan dan informasi saat ini masih menggunakan metode campuran on-line dan off-line, aksesibilitasnya sudah tersedia on-line, baik internal maupun eksternal.

Ke depan agar pengembangan *E-Government* mampu memberikan manfaat bagi masyarakat maka Pemerintah Daerah harus sudah memiliki landasan hukum yang kuat sebagai acuan dalam pengembangan *E-Government* yang berwujud Rencana Induk Pengembangan (RIP). Penyiapan SDM di semua unit/Satuan Kerja harus selalu dilakukan secara kontinyu misalnya melalui kegiatan worksop, BinteK ataupun pelatihan. Pembangunan infrastruktur yang mampu mendukung terciptanya *E-Government* yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara murah dan mudah tanpa melihat tingkatan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam hal ini harus mengalokasikan anggaran daerah yang cukup untuk mensupport pengembangan *E Government*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari-Veikko Anttiroiko, (2008), *Electronic Government: :Concepts, Methodologies, Tools, and Applications*, Finlandia : University of Tampere
- Christopher G. Reddick (ed), (2010), *Comparative E-*

- Government, USA : Department of Public Administration University of Texas
- Darrell M. West, (2005), *Digital Government technology and public sector performance*, New Jersey : Princeton University Press
- Economic and Sosial Commision for Asia and the Pacific Asian Developmen Bank Institute, (2005), *Designing e-Government for the Poor*, United Nations publication
- Effendi, S. (2007). *Membangun Good Governance*. Retrieved September Tuesday, 2010, from Website Staff Universitas Gadjah Mada: <http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/membangun-good-governance.pdf>
- Fatah, U. (2009, December Friday). *Definisi dan Manfaat Utama E-Government*. Retrieved September Wednesday, 2010, from Warta Warga Student Journalism: <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/definisi-dan-manfaat-utama-government>
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Mehdi Khosrow-Pour, (2009), *E-Government Diffusion, Policy, and Impact: Advanced Issues and Practices*, USA : Information Resources Management Association
- Marijn Janssen Hans J. Scholl and Maria A.Wimmer Yao-Hua Tan (Eds.), *Electronic Government*, 10th IFIPWG 8.5 International Conference, E-GOV 2011, Delft, The Netherlands, August 28 - September 2, 2011, Proceedings
- Maria A.Wimmer Hans J. Scholl and Enrico Ferro (Eds.), *Electronic Government*, 7th International Conference, EGOV 2008, Turin, Italy, August 31 - September 5, 2008, Proceedings
- Moleong, Lexy J. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya
- Winfried Lamersdorf (ed), (2010), *Building The E-Service Society : E-Commerce, E-Business, and E-Government*, IFIP 18th World Computer Congress TC6 / TC8 / TC11 4th International Conference on E-Commerce, E-Business, E-Government (I3E 2004) 22-27 August 2004, Toulouse, France
- Rochman, Meuthia Ganie, (2000), *Good Governance dan Tiga Struktur Komunikasi Rakyat dan Pemerintah*, makalah yang disampaikan pada Seminar tentang Good Governance dan Reformasi Hukum, Jakarta.